

AKUNTABILITAS LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN(LPTK) DALAM MEMPERSIAPKAN CALON GURU AGAMA YANG MEMILIKI PERSPEKTIF MULTICULTURAL DAN TIDAK BERGAYA INDOKTRINATIF UNTUK MEMPERKUAT ISLAM KAFFAH

Abidah

ABSTRAK

Guru yang berkualitas akan mampu menciptakan kualitas pendidikan, akan tetapi dewasa ini peranan guru sebagai pendidik profesional mulai dipertanyakan eksistensinya secara fungsional. Hal ini disebabkan oleh munculnya fenomena para lulusan pendidikan secara moral cenderung merosot dan secara intelektual akademis kurang siap untuk memasuki lapangan kerja, terlebih menciptakan lapangan pekerjaan. Guru agama sekalipun yang seyogyanya dapat memperkuat akhlaq mulia, budi pekerti luhur, belum bisa menjawab persoalan kemerosotan moral bangsa apalagi bicara tentang integrasi agama dan sains. Kritikan ini sering bermuara kepada kualitas guru, yakni guru yang tidak menguasai materi, guru yang tidak layak berdiri di depan kelas. Jika Uji Kompetensi Guru (UKG) menjadi acuan, maka jelas terlihat banyak guru dengan kompetensi rendah. Untuk itu sudah seharusnya LPTK bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan tinggi dalam menyediakan calon guru sehingga mampu menciptakan calon guru yang memiliki kompetensi tinggi yang berprespektif multicultural, yang siap menginternalisasikan nilai-nilai kearifan ilmu di lapangan dengan tidak bergaya indoktrinatif dan hanya berorientasi kognitif, sehingga Islam kaffah dapat terwujud.

Kata Kunci: LPTK, Guru, Multicultural

A. Pendahuluan

Umat Manusia dalam kehidupannya membutuhkan agama yang begitu memiliki peran penting. Agama menjadi pedoman, petunjuk (*way of life*) dalam kehidupan manusia sehingga manusia bisa merasakan kehidupan yang damai, bermartabat dan bermakna. Disadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keharusan, yang dapat diperoleh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Pada standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Agama dijelaskan latar belakang pentingnya Pendidikan agama di sekolah/madrasah dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengamalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan (Mendiknas, 2006); menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya (Mendikbud, 2016).

Permasalahan muncul dengan ditunjukkan fakta di lapangan bahwa pendidikan agama belum mampu menyelesaikan persoalan dewasa ini, perkosaan, pembunuhan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, rasisme dan persoalan lainnya. Untuk itu perlu revitalisasi terhadap pembelajaran agama dengan melihat semua komponen pembelajarannya. Agama seharusnya dapat menjadi pendorong bagi umat manusia untuk selalu menegakkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia di bumi ini. Sayangnya, dalam kehidupan yang sebenarnya, agama justru menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan kehancuran ummat manusia (Yaqin, 2005: 34). Maka kepada guru agama tidak hanya dituntut untuk mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran yang diajarkan dan mampu mengintegrasikan dan mengkoneksikan mata pelajaran agama dengan pendekatan sains, agar pembelajaran agama tidak menjadi mata pelajaran yang normatif eksklusif, kaku, konvensional dan juga menjenuhkan. Akan tetapi juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif.

B. Pembahasan

Upaya pencegahan kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama perlu menjadi perhatian para pemikir pendidikan, karena intervensi pendidikan mengakar dan bertahan lama dibandingkan dengan intervensi hukum dan politik. Menjadi tugas guru agama untuk memberikan pemahaman agama yang lebih terbuka dan toleran seperti yang disampaikan Yaqin (2005), "Menggagas pemahaman keagamaan yang lebih inklusif, pluralis dan toleran memang menjadi sebuah keniscayaan. Dengan harapan

kasus-kasus layaknya konflik sosial yang menjurus anarkisme atas nama agama dan kepentingan lain yang menyelinap dibaliknya, tidak terulang di kemudian hari.

Guru agama sebagai salah seorang yang bertanggungjawab dalam pembelajaran agama di sekolah, hendaknya dalam pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah dan rasional bukan bersifat indoktrinasi hal ini seperti yang disampaikan Latief

Doktrin hanya menempatkan peserta didik sebagai objek yang pasif dan pada keharusan menerima setiap ajaran agama tanpa melibatkan emosi dan intelektualnya. Lebih lanjut mengutip pidato Ajat Sudrajat dalam pengukuhan guru besar Fakultas ilmu sosial dan ekonomi UNY di Jokjakarta, menurutnya Pendidikan Agama Islam dilakukan dengan pendekatan ilmiah untuk mengantarkan dan membawa peserta didik pada kesadaran beragama secara rasional. Pendekatan ilmiah yang dimaksud adalah pengetahuan keagamaan akan mengantarkan seseorang memiliki kesadaran beragama dalam mencapai tujuan hidup sebenarnya, ...untuk menghindari kepasifan dan kepasrahan itu harus dilakukan perubahan dalam proses pendidikan agama islam, perubahan itu adalah dengan cara dialogis, dengan melibatkan emosi dan rasionalitasnya peserta didik dalam memahami ajaran agama Islam. Ujar ajat....kesadaran beragama yang diperolehnya muncul bukan sekedar paksaan indoktrinasi melainkan bersandarkan pada pemahaman terhadap ajaran agama, kata Ajat (Kompas, 2016).

Jika sekolah dapat dikembangkan menjadi miniatur masyarakat dengan perilaku seperti yang kita harapkan, maka perilaku seperti itu yang akan berkembang pada siswa. Untuk itu pentingnya membangun iklim/budaya sekolah seperti perilaku yang kita maksudkan. Pembelajaran dengan paradigma keberagamaan yang inklusif, multicultural yang dibutuhkan saat ini.

Setiap agama di dunia memiliki nilai-nilai khas (*typical values*), yang hanya terdapat pada masing-masing agama. Nilai ini diistilahkan dengan nilai partikular. Selain itu setiap agama juga memiliki nilai-nilai umum yang dipercaya oleh semua agama (nilai universal). Wacana multikulturalisme sebenarnya tidak berpretensi menghilangkan nilai-nilai partikultural dari agama. Wacana ini hanya berupaya agar nilai partikultural ini tetap berada dalam exclusive locus. Sekadar berada dalam wilayah komunitas yang mempercayai nilai partikultural itu saja. Sedangkan bagi masyarakat luar yang tidak menyakini nilai partikultural tersebut, maka yang diberlakukan adalah nilai (Yaqin, 2005).

Indonesia sebagai negara yang memiliki pulau dan suku serta penganut agama yang cukup banyak, pada hakikatnya tidak mungkin lagi melepaskan diri dari aspirasi multikultural

Multikulturalisme sebagai suatu paham yang bergerak untuk memahami dan menerima segenap perbedaan yang ada pada setiap individu manusia, potensi cukup besar bagi terjadinya konflik antar kelompok. Prinsip keberagaman di masing-

masing kelompok, misalnya akan mudah menimbulkan “percikan-percikan” konflik antarkelompok yang ada lantaran adanya beberapa perbedaan yang cukup prinsipil dari masing-masing kelompok itu. Bahkan dalam skala lebih luas, manifestasi dari prinsip multikulturalisme itu bisa merambah hingga perbedaan wilayah geografis, etnis budaya, bahasa agama, keyakinan, pola pikir maupun perbedaan kemampuan (*diffable*)-secara fisik maupun psikologis. Perbedaan-perbedaan itulah yang sekiranya tidak segera diantisipasi akan menjadi pemicu konflik. Dan tidak jarang konflik itu akan berujung pada kekerasan fisik, bahkan hingga terjadi Pertumpahan darah (Yaqin, 2005).

Selain perbaikan pembelajaran Agama, indikator lain yang memberi kontribusi negatif dalam perkembangan Pendidikan katakanlah seperti apa yang diungkapkan Azyumardi Azra pada resonansinya di harian Republika, 19 Mei 2016, bahwa:

Ada beberapa masalah pokok yang menjadi akar krisis mentalitas dan moral di lingkungan pendidikan: *Pertama*, arah pendidikan telah kehilangan objektivitasnya, *Kedua*, proses pendewasaan diri tidak berlangsung baik di lembaga pendidikan, yang bertugas mempersiapkan mereka meningkatkan kemampuan merespons dan memecahkan masalah dirinya sendiri maupun orang lain secara bertanggung jawab. *Ketiga*, proses pendidikan di sekolah sangat membelenggu peserta didik dan juga para guru. Hal ini karena formalisme sekolah dan beban kurikulum sangat berat (*overloaded*). Akibatnya, hampir tidak tersisa ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas kognisi, afeksi dan psikomotoriknya. Lebih parah, interaksi sosial di sekolah hampir kehilangan human dan personal touch-nya hampir serba mekanistik dan robotis, *Keempat*, beban kurikulum berat yang masih saja hampir sepenuhnya diorientasikan pada pengembangan ranah kognitif, *Kelima*, menumbuhkan rasa afeksi dalam bentuk verbalisme semata, *Keenam*, kontradiksi nilai, *Ketujuh*, kesulitan mencari contoh teladan (Republika, 2016).

Masalah lain adalah persoalan guru itu sendiri, guru yang rendah kompetensinya baik pedagoginya maupun profesionalitasnya. Jika Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) menjadi acuan, jelas guru agama dan pemerintah harus banyak berbenah, meski UKG sendiri masih menyisakan persoalan akan tetapi kalau guru mau jujur dengan kompetensinya hari ini, tidak banyak diantara mereka yang benar-benar layak berdiri di depan kelas, bahkan tragis banyak guru agama sendiri tidak mampu membaca Al-Qur'an, yang menjadi referensi utama dalam pembelajaran agama islam itu sendiri belum lagi bicara pemahaman materi lain yang termuat pada kurikulum sehingga ketergantungan guru terhadap buku teks berada pada titik nadir, ini menunjukkan betapa kompetensi guru agama benar-benar berada pada persoalan yang sangat mendasar yakni kompetensi yang rendah.

Untuk itu guru perlu dilakukan penguatan baik dalam bentuk pelatihan, penataran maupun seminar dengan intensitas yang cukup signifikan dan berkelanjutan maupun dalam bentuk *on going service training*. Tidak tepat lagi rasa-rasanya dewasa ini membahas besaran uang untuk penguatan guru menjadi kendala dalam melaksanakan pelatihan yang baik, hal ini jika melihat besaran perkapita, katakanlah Aceh saat ini merupakan salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia dengan pendapatan perkapita yang tinggi dan penerima dana otsus yang 30%-nya diperuntukan untuk pendidikan, masih menjadikan Aceh dengan predikat ketiga terendah kualitas guru dari 34 provinsi di Indonesia.

Guru Agama harus mendapat penguatan tidak hanya dari aspek metode akan tetapi juga dari sisi penguasaan materi pelajaran agama itu sendiri, sehingga guru tidak gagap dalam pembelajaran dan mengajar dari hati karena dipengaruhi oleh pemahamannya yang kuat terhadap kebijaksanaan ilmu agama itu sendiri sehingga mampu menginternalisasi ilmu yang tidak hanya dihapal secara kognitif akan tetapi terinternalisasi di hati (afektif) maupun perkembangan psikomotoriknya bahkan lebih jauh lagi menjadi *life skill*nya dalam berkehidupan secara sosial, seperti contoh sebagai berikut:

Kondisi hari ini banyak kalangan yang terdera kesulitan untuk melakukan distingsi antara agama (*religion al dhiin*) sebagai sumber berupa wahyu ilahi, dengan pemikiran agama (*religion thinking/al fikr al dhiin*) yang notabene merupakan hasil olah logika manusia terhadap agama. Kesulitan itu muncul tatkala seseorang atau kelompok harus membedakan posisi agama dengan segenap doktrinnya-dengan pemikiran agama, berlandaskan kaidah, Agama sebagai *way of life* yang wajib diikuti serta diyakini kebenarannya oleh pemeluk agama secara absolut, di sisi lain *religion thinking* sebagai hasil pemahaman manusia memiliki kebenaran nisbi (*dhany*) yang terus mengalami dinamika, maka harus bisa dibedakan mana yang mesti diimani dan dipertahankan mati-matian (dalam terma fiqh dan ushul fiqh) kapanpun dan dimanapun dengan mana yang perlu dipertimbangkan ulang untuk dipraktikan pada ruang waktu tertentu. Posisi keduanya terkadang masih jumbuh dan tidak jelas karena berbaur lebur. Padahal pemosisian ini penting, karena sangat rentan dan berdampak fatal jika tidak dilakukan secara tepat. Sebagai contoh doktrin jihad yang secara gamblang tersurat dalam Al-Qur'an misalnya, apabila salah dipahami akan menjadi sangat kontra produktif bahkan fatal (Yaqin, 2005).

Contoh diatas, menunjukan kepada kita bahwa guru agama harus menguasai materi dengan kebijaksanaan materi itu sendiri, guru harus menjadi penggagas pemahaman keagamaan yang lebih inklusif, dan toleran, ini harus menjadi sebuah

keniscayaan, dengan harapan kasus-kasus layaknya konflik sosial yang menjurus anarkisme atas nama agama dan kepentingan lain yang menyelinap di baliknya, tidak terulang (Yaqin, 2005).

Dengan kebijaksanaan ilmu seorang guru, pada gilirannya siswa-siswa yang menjadi peserta didiknya mendapatkan kebijaksanaan ilmu agama itu sendiri. Karena perubahan-perubahan bangsa ditentukan oleh perubahan-perubahan di dalam kelas. Hal ini seperti yang dijelaskan Khoe Yao Thung:

Pembangunan pendidikan nasional tidak terpisahkan dari perubahan-perubahan yang berlangsung di dalam kelas. Perubahan-perubahan dan kecenderungan-kecenderungan itu lebih banyak berlangsung karena adanya interaksi guru dan siswa di dalam kelas. Guru adalah profesi yang memegang peranan sentral dalam menentukan generasi penerus bangsa ini. Tanpa meningkatkan mutu guru, pekerjaan membentuk SDM yang kompetitif dan berbudi pekerti baik akan menjadi sia-sia (Thung, 2001: 83).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa guru merupakan *key success factor* dalam keberhasilan pendidikan. Dari gurulah siswa mendapatkan action exercise dari pembelajaran yang diberikan. Aubrey C. Daniels dalam bukunya *other people habits* mengemukakan bahwa seorang pendidik harus mampu menggunakan penguatan positif (*positif reinforcement*) agar orang-orang disekitarnya dapat bertindak dengan tingkah laku yang terbaik dalam hidupnya. Lebih jauh lagi seorang pendidik harus mampu menjadi *behavior manager* di dalam kelas (Thung, 2001: 69).

Sependapat dengan pepatah Jawa yang berbunyi "*Kacang ora bakal ninggal lanjarane*", artinya dalam pertumbuhannya, kacang panjang akan mengikuti batang kayu tempatnya merambat. Pepatah tersebut sangat sesuai dengan prinsip pendidikan anak-anak, karena sebenarnya perilaku anak itu cenderung meniru (*imitating*) perilaku orang dewasa yang disekitarnya. Oleh karena itu kata-kata mutiara berjudul *anak belajar dari kehidupannya* yang ditulis oleh Dorothy L. Nable patut untuk direnungkan...*jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia akan belajar menghargai, jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia akan belajar percaya diri...* (Samani, 2010: 103).

Untuk itu guru masih berhutang banyak ke siswa dan sekolah dimana ia mengajar dalam hal keteladanan, sekali lagi guru adalah yang digugu dan ditiru, sudah seharusnya guru berkomitmen untuk memberi keteladanan dan pembiasaan positif sehingga

menularkan energi positif ke siswa dengan tidak pernah merasa pesimis apalagi menyerah meski diluar pagar sekolah, anak-anak menemukan pembiasaan yang tidak diharapkan. Karena idealnya untuk mendidik anak dibutuhkan warga sekampung, tidak hanya guru dan orang tua seperti yang diungkapkan oleh Hillary Rodham Clinton: *It Takes whole village to teach one child*. Bahkan bagi Singapura penegakan budi pekerti dalam berbangsa dan bernegara, bukan sekedar urusan sekampung tapi urusan Negara (Thung, 2001: 68).

Dari uraian di atas jelas bahwa solusi yang mendasar adalah perbaiki guru dengan memperkuat keempat kompetensinya, mengingat peran dan tanggung jawab guru dalam proses pendidikan sangat berat, dimana semua aspek kependidikan terkait dengan nilai-nilai. Melihat guru bukan saja pada penguasaan material-pengetahuan, tetapi juga pada investasi nilai-nilai moral dan spiritual yang diembannya untuk ditransformasikan kearah pembentukan kepribadian anak didik. Sebagai komponen paling pokok dalam pendidikan, guru dituntut bagaimana membimbing, melatih dan membiasakan anak didik berperilaku yang baik. Karena itu, eksistensi guru tidak saja mengajarkan tetapi sekaligus mempraktikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai kependidikan tersebut.

Penyediaan guru sekolah adalah menjadi tugas utama dari LPTK, untuk menghasilkan guru yang berkualitas, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar proses pendidikan calon guru berjalan dengan baik, sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Seleksi terhadap calon guru dilakukan secara selektif untuk menghasilkan calon guru yang kualitasnya baik. Sarana dan prasarana belajar di LPTK harus memenuhi standar minimal pendidikan calon guru. Didukung dengan kecukupan dosen yang bermutu, yang mampu menerjemahkan dan melaksanakan kurikulum perkuliahan dengan baik, serta dukungan masyarakat dan semua unsur yang terkait dengan proses penyiapan guru.

Penyiapan guru sebagai tenaga kerja pada lembaga pendidikan dan pembinaannya merupakan kebutuhan dan sekaligus sebagai keharusan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Oemar Hamalik:

Penyiapan tenaga kerja dan pembinaannya merupakan kebutuhan dan sekaligus sebagai keharusan. Penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan dan tuntutan lapangan dilakukan melalui pendidikan formal dalam berbagai jalur dan

jenjang serta satuan pendidikan. Pembinaan tenaga dilakukan melalui pembinaan secara langsung dan program pelatihan. Dengan program pelatihan yang efisien dan efektif, maka kemampuan yang diperoleh melalui program pendidikan formal dapat diperkaya dan terkait erat dan serasi dengan tuntutan lapangan kerja, yang terus meningkat (Hamalik, 2005: v).

Kutipan diatas menjelaskan bahwa enyiapan tenaga kerja harus melalui pendidikan formal dalam satuan pendidikan, Hal yang sama seperti disampaikan Agus Suwigyo, sebagai berikut:

Kunci pembaruan hakiki pendidikan adalah perbaikan kualitas guru. meskipun garis besar peningkatan kualitas guru telah tertuang dalam UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, hingga sekarang belum ada kepastian tentang arah dan format pendidikan guru, pendidikan profesi guru, dan pendidikan/pelatihan lanjutan guru. Upaya meningkatkan profesionalitas guru masih terjebak pada hiruk pikuk kebijakan strategis pada ranah hilir berupa sertifikasi, tunjangan sertifikasi dan yang terakhir adalah Uji Kompetensi Awal. Selanjutnya ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya berfokus dulu pada pementapan pendidikan calon guru, pendidikan gurulah yang dimatangkan dan diperbaharui agar dihasilkan profil kompetensi guru yang purna. Gurulah yang harus dijadikan fokus kebijakan peningkatan mutu pendidikan (Forum Mangunwijaya VII, 2013: 72-73).

Jelas bahwa bicara perbaikan guru harus dimulai dari perbaikan lembaga pendidikan penghasil guru itu sendiri yakni LPTK, lulusan LPTK yang akan menjadi guru harus menguasai ketiga komponen trilogi profesi (1) komponen dasar keilmuan, (2) komponen substansi profesi, (3) komponen praktik profesi. Yang dimaksud komponen dasar keilmuan yaitu substansi bidang ilmu yang akan menjadi mata ajar yang dibina selama menjadi guru mata pelajaran. Keilmuan tersebut harus dikuasai dengan baik oleh setiap calon guru. Tidak ada tawar menawar. Calon guru yang tidak menguasai bidang keilmuannya secara baik, seharusnya tidak lolos menjadi calon guru, karena hal ini hanya akan merugikan persekolahan kita. Komponen kedua yakni substansi profesi yaitu ilmu keguruan yang antara lain berisi pedagogi, dedaktik dan metodik khusus mengajar, psikologi perkembangan dan sebagainya. Setiap calon guru harus menguasai keilmuan ini, agar dapat memberikan pelayanan mengajar dengan baik.

Komponen pratik profesi yaitu berkaitan dengan performan mengajar didepan kelas. Para calon guru harus mengalami banyak praktik mengajar dikelas sebelum benar-benar menjadi guru di kelas. Jika kita melihat finlandia dengan kebijakan pendidikannya, sebagai berikut:

Guru-guru Finlandia yang bergelar master memiliki hak akses kepada program doktor untuk melengkapkan kesempatan pengembangan profesional yang lazim. Guru sekolah Dasar dengan mudah dapat memulai studi lanjut mereka di fakultas pendidikan; disertasi doktor mereka akan berfokus pada sebuah topik pilihan dalam ilmu kependidikan. Banyak guru sekolah dasar yang memanfaatkan peluang ini, sering sambil tetap mengajar di sekolah. Program doktor pendidikan untuk guru mata pelajaran yang gelar sebelumnya ada di bidang akademik lain memerlukan kerja tambahan. guru-guru ini pertama-tama harus menyelesaikan studi lanjut dalam ilmu kependidikan karena perlunya perpindahan bidang dari apa yang dipelajari sebelumnya, misalnya kimia, ke pendidikan agar mahasiswa layak menyelesaikan riset mereka di bidang pendidikan (Sahlberg, 2014: 188).

Finlandia telah menunjukkan bagaimana kebutuhan akan pendidikan guru sebagai bentuk yang diyakini mampu menciptakan guru yang berkualitas. Berikut pembelajaran di LPTK sebagai sebuah sistem, maka semua komponen sistem pembelajaran harus berfungsi dengan baik. Sebagai *raw-input* adalah mahasiswa, dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban serta haknya secara jelas. Komponen lain yang harus berfungsi dengan baik adalah *instrumental-input* yaitu dosen, kurikulum, sarana dan prasarana, biaya. Komponen ketiga adalah *environmental-input*, yaitu orangtua, asrama, masyarakat, dsb. Semua komponen dalam sistem pembelajaran tersebut harus berjalan dan berfungsi baik, supporting terhadap proses belajar-mengajar di kampus maupun di rumah, sehingga kualitas calon guru tersebut dipastikan baik.

LPTK sebagai sistem pendidikan guru perlu dilihat akuntabilitasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam standar mutu. Akuntabilitas Pendidikan Guru berkaitan erat dengan akreditasi, promosi, pengawasan serta pada puncaknya pemberian penghargaan dan hukuman. Ada tiga bentuk akuntabilitas perguruan tinggi yakni: Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME):

PDPT dimaksudkan untuk memenuhi pasal 50 UU sisdiknas yang mengatur bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. Dengan demikian, sub sistem ini dibangun untuk memenuhi tugas dan wewenang pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pemenuhan SNP. Karena itu PDPT merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*), SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagai upaya memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, pendidik, tenaga pendidik) karena itu, SPMI merupakan sub sistem pertanggungjawaban horizontal internal (*Internal-horizontal accountability*). SPME melalui penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, berdasarkan SNP atau standar yang melampaui SNP (yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri), dimaksudkan untuk memenuhi terutama

kebutuhan eksternal stakeholder (orang tua, dunia kerja, masyarakat, pemerintah). Karena itu SPME merupakan sub sistem pertanggungjawaban horizontal-eksternal (*eksternal horizontal accountability*) (Kemendiknas, 2010).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa dalam akuntabilitas Mutu Perguruan Tinggi sebagai LPTK terdiri PDPT, SPMI, SPME. Jika ketiga akuntabilitas mutu ini dilakukan dengan objektif, maka Perguruan Tinggi sebagai lembaga penghasil guru, yang jika Perguruan Tinggi tersebut berkualitas tinggi akan melahirkan guru yang berkualitas tinggi pula dan begitu sebaliknya. Hal yang paling kelihatan dipermukaan adalah akreditasi. "Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan" (Peraturan Pemerintah RI No 32, 2013). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 60, Ayat:

- 2). Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik
- 3). Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Akreditasi dilakukan untuk melihat, apakah Perguruan Tinggi tersebut sudah memenuhi standar. Adapun, "Standar Nasional Perguruan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat" (Permendikbud RI No 49: 2014).

Upaya perolehan akreditasi terkadang juga menyisakan persoalan, misal dalam pengisian Borang Akreditasi, tidak jarang perguruan tinggi menginput data-data tidak dengan fakta riil yang terdapat di perguruan tinggi tersebut, yang terjadi adalah mark up dan manipulasi data, anehnya borangpun sering diterjemahkan dengan bohong dan ngarang. Untuk itu dibutuhkan kejelian Asesor, dalam menetapkan akreditasi perguruan tinggi.

Esensi dari otonomi Pendidikan Tinggi sebenarnya berfokus pada akuntabilitas atas pelayanan akademik yaitu pelayanan yang bermutu tinggi, inovatif dan mampu mengadaptasi tuntutan kebutuhan masyarakat. Rendahnya kualitas lulusan PT lebih banyak dikarenakan kita berfokus pada masalah administratif, standarisasi dan bukan pada kualitas ilmu, suasana pembelajaran dan pelayanan pada mahasiswa.

Selain standar perguruan tinggi diatas menjadi perhatian dalam hal akuntabilitas perguruan tinggi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga penyedia guru, tidak dibiarkan berjalan sendiri, akan tetapi dibutuhkan koordinasi dengan lembaga pengguna jasa lulusan, sehingga lulusan perguruan tinggi adalah lulusan seperti yang diharapkan oleh lembaga pengguna jasa lulusan. Berkaca pada bagaimana Departemen Pendidikan Finlandia berkoordinasi dengan pihak Universitas perihal kurikulum:

Program pendidikan guru di Finlandia menyajikan rangkaian spiral pengetahuan teoritis, pelatihan praktis dan kajian pengajaran berorientasi riset. Tanggung jawab pendidikan guru terintegrasi di dalam kegiatan-kegiatan satuan akademik universitas. Kurikulum dikoordinasikan dengan departemen Pendidikan Guru yang bertanggung jawab atas pengorganisasian pendidikan guru secara keseluruhan (Sahlberg, 2014: 184).

Di samping beberapa hal seperti yang sudah dijelaskan diatas, ada syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa calon guru dan para dosennya. Harus ada komitmen yang jelas dan nyata, bahwa mahasiswa harus sanggup dan mau belajar dan bekerja keras untuk menyiapkan diri menjadi guru berkualitas. Dosen harus mau dan sanggup bekerja keras untuk mendidik dengan serius para calon guru. Komitmen ini sangat penting, karena akan menjadi motivasi kuat membangun dirinya masing-masing. Motivasi yang kuat akan memperlancar upaya pencapaian sasaran untuk menjadi guru berkualitas dan profesional. Pilihan menjadi guru bukan pilihan yang kedua, akan menentukan kualitas calon guru, seperti apa yang disampaikan berikut:

Finlandia memiliki tiga kekhasan berikut: 1) Individu yang paling mampu dan berbakat masuk keguruan, 2) Ada kerja sama erat antara fakultas bidang studi dan fakultas pendidikan, 3) Pendidikan Guru Berorientasi Riset. Potensi terbesar pendidikan guru Finlandia terletak pada ratusan orang muda berbakat tertarik pada profesi keguruan karena mereka memandangnya sebagai profesi mandiri, terhormat, dan memberi kepuasan, yang ada dalam profesi itu mereka memiliki kebebasan untuk memenuhi aspirasi mereka. Selanjutnya fakultas-fakultas pendidikan dan berbagai bidang keilmuan dalam satu universitas juga saling bergantung secara positif. Mereka bisa berhasil secara berkelanjutan hanya jika semua pihak tersebut melakukan yang terbaik. Orientasi riset pada pendidikan guru mempersiapkan guru-guru, di semua jenjang sekolah, untuk berkerja di lingkungan kompleks dengan perubahankemasyarakatan dan pendidikan.

Pengalaman Finlandia dalam penyediaan guru, harusnya dapat menginspirasi LPTK di Indonesia dalam penyediaan guru, sehingga persoalan guru dapat terselesaikan dalam waktu yang tidak lama. Semangat dan mentalitas pengelola LPTK harus bermuatan semangat dan mentalitas perubahan, jika tidak *dark circle* terus berputar begitu-begitu saja.

C. Penutup

Eksistensi, peranan dan fungsi guru merupakan keharusan yang tidak dapat diingkari. Bahkan ada statment tidak ada pendidikan tanpa “kehadiran guru”. Guru merupakan penentu arah dan sistematika pembelajaran mulai dari perencanaan pembelajaran, penentuan dan pemanfaatan sarana prasarana pendidikan, model dan

pola, serta pada tahapan upaya bagaimana peserta didik seharusnya belajar dengan baik dan benar dalam rangka mengakses diri, akan pengetahuan dan nilai-nilai hidup.

Guru Agama sebagai orang yang berdiri di garda terdepan (*front liner*) pendidikan mata pelajaran agama harus memiliki perspektif multicultural dan tidak bergaya indoktrinatif, agar pembelajaran agama dapat menyentuh sisi spritual dan kehumanisme peserta didik, pada gilirannya Islam kaffah dalam berkehidupan secara sosial dapat terwujud.

LPTK sebagai lembaga penyedia calon guru, sudah saatnya memiliki akuntabilitas yang tidak hanya pada sisi fisik pemenuhan standar akreditasi yakni tentang bagaimana kesesuaian rasio dosen dan mahasiswa, kelengkapan sarana prasarana, akan tetapi hendaknya sudah mencapai pada tahapan kesesuaian proses, dan perubahan perspektif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural, Cross-cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Pilar Media, Jokjakarta, 2005.
- Khoe Yao Thung, (2001), *Simponi Sedih Pendidikan Nasional*, Jakarta, Abdi Tandur.
- Muchlas Samani, (2010), *Pendidikan Bermakna*, Surabaya, Surabaya, SIC
- Oemar Hamalik, *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Pelatihan Ketenagkerjaan Pendekatan Terpadu*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Forum Mangunwijaya VII, *Menyambut Kurikulum*, Jakarta, buku Kompas, 2013
- Pasi Sahlberg, *Finnish Lessons*, (terj) Ahmad Muchlis, Bandung, Kaifa, 2004
- Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)*, Jakarta, 2010
- Peraturan Pemerintah RI Nomor. 32 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang *standar Nasional Pendidikan Tinggi*
- Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
- Educasi.kompas.com/read/2011/04/05/14202656/Gaya.Indoktrinasi.Harus.Diuba, accessed 8.50 tanggal 28 Agustus 2016
- www.republika.co.id/berita/kolom/resonasi/16/05/18/o7dorm319-akhlak-mulia-budi-pekeriti-luhur-dan-pendidikan, accessed jam .9.00 tanggal 28 Agustus 2016.